



Laporan RENJA (Rencana Kerja) Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BPPMHKP PALANGKA RAYA

BPP
MHKP
KALIMANTAN TENGAH

Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya*” maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya ikut mewujudkan misi BPPMHKP yaitu :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu
2. Produk hasil perikanan.
3. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
4. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
5. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Palangkaraya untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Palangkaraya Tahun 2025 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai Stasiun KIPM Palangkaraya Tahun 2025.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Palangkaraya Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Palangka Raya, 19 Januari 2025

SKIPM Palangka Raya,

Kepala



Miharjo, S.St.Pi, M.M

Daftar Isi

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Grafik

I.	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	3
	B. Tujuan	
	C. Sasaran	
II.	Rencana Strategis	
	A. Arah Kebijakan	
	B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	
	C. Indikator Kinerja	
	D. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Palangkaraya	
III.	PENUTUP	

Daftar Grafik

1. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Palangkaraya per jenis Kegiatan
2. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil Perikanan Palangkaraya per kegiatan dan per jenis belanja

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan, di antaranya adalah praktik pengelolaan yang belum sepenuhnya berkelanjutan, kerusakan ekosistem laut, serta penurunan kualitas sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan perusakan habitat laut. Selain itu, daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global masih terhambat oleh kualitas yang belum memenuhi standar internasional, infrastruktur yang terbatas, serta sistem pengawasan yang belum optimal. Kurangnya pemberdayaan bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, pembudidaya, pengolah dan petambak garam, juga turut memperburuk kondisi ini, menjadikan sektor ini belum sepenuhnya mampu bersaing di kancah global.

Mengacu pada kerangka pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan sistem perencanaan sebagai tata cara untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ini, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memiliki posisi yang sangat strategis, dengan tujuan memastikan kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Renstra K/L adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengarahkan kebijakan dan program pembangunan lima tahunan, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

Renstra BPPMHKP 2025-2029 harus lebih menekankan pada penerapan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dengan memastikan standar mutu internasional diterapkan. Hal ini penting tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga untuk pasar internasional yang semakin menuntut kualitas yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, upaya pengelolaan dan pengawasan yang lebih transparan juga akan memperkuat daya saing Indonesia dalam industri kelautan global. Tantangan tersebut menuntut kebijakan yang responsif terhadap perubahan dinamika pasar dan teknologi terbaru dalam pengolahan hasil perikanan.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana Kinerja dan anggaran BKIPM tahun 2025 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya pada tahun 2025.

C. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan bppmhp adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Palangkaraya Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM BKIPM tahun 2020-2024 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya pada tahun 2025.

Rencana Strategis

A. Lingkungan Strategis

BPPMHKP memiliki mandat untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui pelaksanaan fungsi utama (1) penyusunan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; (2) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; (3) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Hal tersebut harus didukung dengan rencana strategis yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis agar memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan strategisnya, BPPMHKP harus mempertimbangkan faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, guna memastikan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan. Lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja BPPMHKP dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal.

B. Arah Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan

yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan
2. penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik
3. dan ekspor;
4. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan advanced
5. technology; dan
6. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis SKIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut:

2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil

perikanan pada tahun anggaran 2024. Indikator Kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja UPT berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian Target IKU Stasiun
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan
Palangka Raya Tahun 2025**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FREKUENSI	POLA HITUNG	TARGET						
				TW I	TW II	s.d TW II/Semester I	TW III	s.d TW III	TW IV	s.d TW IV/Semester II/Tahunan
1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	Persentase	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	70	70	70	70	70	70	70
2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	Persentase	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	70	70	70	70	70	70	70
3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	Persentase	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						99	99
4 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	Nilai	Tahunan	Rata-Rata						75	75
5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	Nilai	Tahunan	Rata-Rata						75	75
6 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	Nilai	Semesteran	Nilai Posisi Akhir		85	85			92	92

7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						71,5	71,5
8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	Persentase	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						100	100
9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)	Nilai	Semesteran	Nilai Posisi Akhir		81	81			87	87
10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						86	86
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	Persentase	Triwulan	Rata-Rata	85	85	85	85	85	85	85
12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	Persentase	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	76	76	76	76	76	76	76
13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	Persentase	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						70	70
14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	Nilai	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	88	88	88	88	88	88	88

C. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Palangkaraya

Rencana Kinerja dan anggaran Stasiun KIPM Palangkaraya tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target Kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana Kinerja Stasiun KIPM Palangkaraya dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6.016.527 ,-

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Palangkaraya tahun 2024 untuk mewujudkan target-target Kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan- kegiatan prioritas sehingga

alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut.

RENCANA KINERJA
TAHUNAN TAHUN
ANGGARAN 2025

No.	URAIAN	KODE	URAIAN	INDIKATOR (UNTUK RO)	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1	Kementerian	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
2	Fungsi	01	PELAYANAN UMUM				
		04	EKONOMI				
3	Unit Eselon 1	032.13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (BKIPMP)				
4	Program	1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
		2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
		3	Program Dukungan Manajemen				
5	Program 1	032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				258.000.000
	Sasaran Program	03	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat				
	Indikator Kinerja Program	03.01	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor				
		03.02	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor				
		03.03	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI				
	Kegiatan	3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				100.000.000
		3989.PDC	Sertifikasi Produk		1	Produk, Sertifikat	50.000.000
		3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi		1	Produk	
		051		Validasi produk pada sektor produksi pasca panen			50.000.000
		3989.PDF	Sertifikasi Lembaga		3	Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	40.000.000
		3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi		3	Lembaga	
		051		Validasi Sertifikasi Produksi Primer			40.000.000
		3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	10.000.000
		3989.QIC.002	Upi Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan		1	Lembaga	
		051		Upi Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan			10.000.000

	Kegiatan	7010	Manajemen Mutu				158.000.000
		7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	6.000.000
		7010.ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		1	Rekomendasi Kebijakan	
		001		Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor			6.000.000
		7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		1	Orang, Kegiatan	8.500.000
		7010.DCC.001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan		1	Kegiatan	
		001		Peningkatan kompetensi inspektur mutu			8.500.000
		7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	80.000.000
		7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan		1	Rekomendasi Kebijakan	
		001		Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			80.000.000
		7010.PDD	Standarisasi Lembaga		2	Lembaga, Unit Kerja	55.000.000
		7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu		1	Lembaga	
		001		Penerapan Standar Metode Pengujian			25.000.000
		7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium		1	Lembaga	
		001		Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			30.000.000
		7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		1	Produk, Laporan, Keputusan	8.500.000
		7010.QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi		1	Produk	
		001		Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance			8.500.000
6	Program 2	032.13.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				441.500.000
	Sasaran Program	11	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaya, akuntabel, dan berkelanjutan				
	Indikator Kinerja Program	11.05	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM				
		11.06	Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi				
		11.11	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (jumlah produk sesuai persyaratan Indonesia/total impor yang masuk)				
		11.12	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan				
	Kegiatan	3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
		3990.ADD	Standardisasi Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja	12.500.000
		3990.ADD.001	Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik		1	Lembaga	
		002		Inovasi Pelayanan Publik BKIPM yang lulus Seleksi KIPP MenpanRB			12.500.000
		3990.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	70.000.000
		3990.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter Uji Yang Terakreditasi Di Laboratorium Acuan Dan Penguji Sektor Kelautan Perikanan		1	Rekomendasi Kebijakan	
		001		Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BKIPM			64.000.000
		002		Jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan			6.000.000

		3990.PDD	Standarisasi Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja	25.000.000
		3990.PDD.002	Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium		1	Lembaga	
		003		Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025)			25.000.000
		3990.QDC	Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat		110	Orang	245.000.000
		3990.QDC.001	Masyarakat Yang Meningkatkan Pemahamannya Terhadap Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan		110	Orang	
		001		Bakid Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan dan Bimtek Jaminan Mutu			245.000.000
		3990.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		6	Produk, Laporan, Keputusan	89.000.000
		3990.QIA.001	Usaha Perikanan Yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar, Sistem Dan Regulasi		6	Produk	
		001		Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance pada proses produksi perikanan budidaya (Program Unggulan KKP)			89.000.000

7	Program 3	032.13.WA	Program Dukungan Manajemen				5.053.207.000
	Sasaran Program	15	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BKIPM				
	Indikator Kinerja Program	15.01	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) BKIPM				
		15.02	Indeks Profesionalitas ASN				
		15.03	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi				
		15.04	Batas Tolansi Malenafitas Temuan Pengawas Internal dan Total Realisasi Anggaran				
		15.05	Nilai Penilaian Mandiri SARIP BKIPM				
		15.06	Nilai Matufas SPIP				
		15.07	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar				
		15.08	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja				
		15.09	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik				
		15.10	Nilai SOPA				
		15.11	Nilai NKRA				
		15.12	Indeks Kualitas Kebijakan Inklusif BKIPM				
	Kegiatan	3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan				
		3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.976.837.000
		3987.EBA.962	Layanan Umum		1	Layanan	
		001		Layanan Umum dan Rumah Tangga			306.370.000
		3987.EBA.954	Layanan Perkantoran		1	Layanan	
		001		Gaji dan Tunjangan			1.523.822.000
		002		Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.346.645.000
		3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	76.370.000
		3987.EBD.962	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran		1	Dokumen	
		001		Layanan Perencanaan dan Penganggaran			54.822.000
		3987.EBD.965	Layanan Manajemen Keuangan		1	Dokumen	
		001		Layanan Manajemen Keuangan			21.548.000